

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin agar kinerja perusahaan terlihat baik sehingga banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Agar perusahaan memiliki kinerja yang baik, pemilik perusahaan akan memberikan wewenang kepada pihak manajemen yang lebih berkompeten untuk mengelola perusahaan. Untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, diperlukan suatu media yang dapat menginformasikan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Menurut Pamungkas et al. (2018) laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mengomunikasikan data keuangan atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan.

Sebagai bentuk transparansi manajemen sebagai pihak yang dipercayai oleh pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan maka manajemen harus membuat laporan keuangan yang menginformasikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Anggraini (2021) menyatakan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab dari manajemen adalah dengan membuat laporan keuangan yang disajikan secara andal, relevan, dan terbebas dari *fraud*. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya karena informasi dalam laporan keuangan umumnya diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi (Indiraswari & Izzalqurny, 2021). Menurut M. A. Dewi et al. (2021) para pemangku kepentingan akan menggunakan informasi keuangan untuk berbagai hal, seperti untuk menilai kinerja manajemen, mengambil keputusan, perhitungan pajak, menilai kelayakan investasi atau utang, sampai akuntabilitas kepada publik.

Namun pada faktanya agar kondisi ekonomi perusahaan terlihat baik dan manajemen dinilai memiliki kinerja yang bagus dalam menjalankan bisnis

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

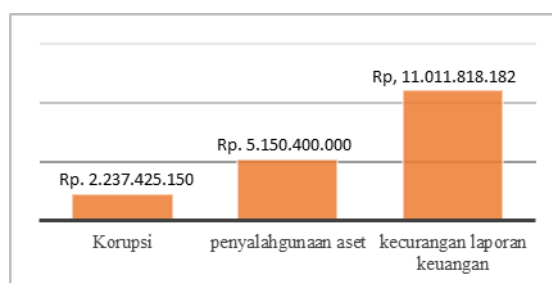
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan, pihak manajemen terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja yang baik meskipun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Nursiam & Ghaisani (2021), tindak kecurangan laporan keuangan atau *financial statement fraud* yang dilakukan oleh perusahaan terjadi karena adanya keinginan untuk menerbitkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu perusahaan yang baik. Sebagai pengelola perusahaan, tentu saja pihak manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pihak manajemen yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaannya. Kondisi tersebut mungkin saja membuat manajemen melakukan tindakan kecurangan dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta memiliki peluang untuk memanipulasi laporan keuangan.

Laporan keuangan yang mengandung informasi palsu dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan bagi pengguna laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan para *stakeholder* dalam mengambil suatu keputusan. Md Nasir et al. (2018) mengungkapkan bahwa insiden *financial statement fraud* telah melemahkan keandalan laporan keuangan perusahaan dan telah memengaruhi kemampuan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang merugikan yang dilakukan secara sengaja demi kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan memanipulasi dan memberikan laporan yang keliru kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.



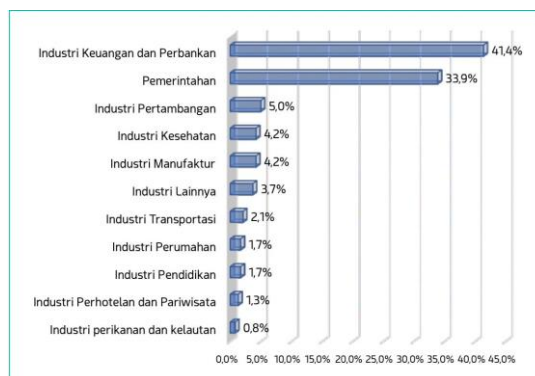
Gambar 1.1 Rata-rata jumlah kerugian per kasus

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2019

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter (2019), ditemukan bahwa pada tahun 2019 terdapat 239 kasus *fraud* di Indonesia dan kasus *financial statement fraud* merupakan *fraud* terbanyak ketiga dengan presentase sebesar 6,7% setelah penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan dengan presentase 28,9% dan tindak korupsi dengan presentase sebesar 64,4%. Akibat tindakan kecurangan tersebut, pada tahun 2019 Indonesia harus menanggung kerugian sebesar Rp. 873.430.000.000. *Financial statement fraud* merupakan jenis kasus dengan nominal kerugian terbesar dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar Rp. 11.011.812.182.



Gambar 1.2 Jenis industri yang paling dirugikan

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2019

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter (2019) jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan. Dari total 239 kasus *fraud* yang terjadi, terdapat 99 kasus yang terjadi di sektor industri keuangan dan perbankan. Terdapat beberapa skandal *financial stamenet fraud* yang terjadi di sektor industri keuangan dan perbankan Indonesia, diantaranya yaitu kasus laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh PT. Bank Lippo Tbk. Menurut Ketua Bapepam Herwidayatmo, Bank Lippo membuat laporan keuangan dengan dua versi dan keduanya dinyatakan audited. Terdapat perbedaan laporan keuangan Bank Lippo yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEI. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan ke publik melalui media massa, Bank Lippo menyebutkan total aktiva perusahaan

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Rp. 24 triliun dan laba bersih Rp. 98 miliar. Sedangkan dalam laporan keuangan yang dilaporkan kepada BEI, Bank Lippo menyebutkan bahwa total aktiva perusahaan hanya Rp. 22,8 triliun dan perusahaan melaporkan rugi bersih Rp. 1,3 triliun (Syahrul, 2003)

Praktik penipuan akuntansi di sektor keuangan berikutnya dilakukan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang diduga telah melakukan kecurangan dengan menambah, menggandakan, dan menggunakan data piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Piutang itulah yang dijamin kepada para kreditur untuk membayar hutangnya. Skema kecurangan pada laporan keuangan tersebut sangat merugikan para *stakeholder* (Nurmayanti, 2018). Slamet Edi Purnomo, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK mengungkapkan bahwa nilai pembobolan dana SNP Finance di 14 bank mencapai Rp.2,4 triliun (Indrastiti, 2018).

Skandal berikutnya adalah praktik penipuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Tbk yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Direktur keuangan Bank Bukopin mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 diketahui telah terjadi pencatatan tak wajar dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan terungkap bahwa kasus tersebut telah terjadi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 bank bukopin membukukan laba sebesar Rp. 1,08 triliun. Namun setelah direvisi, laba bank bukopin pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 183,56 miliar (Jatmiko, B. P., 2018). Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit yaitu dari Rp. 1,06 triliun menurun menjadi Rp. 317,88 miliar. Kemudian manajemen bank bukopin secara terang-terangan merevisi laporan keuangan tahun 2015, 2016, dan 2017 (Banjarnahor, D., 2018).

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Skandal tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyebutkan sejak tahun 2002 Jiwasraya sudah mengalami kesulitan dan sejak tahun 2006 Jiwasraya telah membukukan laba semu sebagai akibat dari rekayasa akuntansi. Kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut terjadi akibat dari kesalahan dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Diketahui bahwa Jiwasraya telah meluncurkan produk JS Savings Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Namun sayangnya Jiwasraya menginvestasikan dana tersebut pada saham dan reksadana yang berkualitas rendah hingga pada akhirnya Jiwasraya tak mampu membayar polis asuransi (gagal bayar) JS Saving Plan (Ulya, 2020). Selain itu mengutip dari berita CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 Jiwasraya membukukan laba sebesar Rp. 2,4 Triliun naik 37,64% dari tahun 2016. Lalu pada tahun 2018 terjadi pergantian direksi Jiwasraya dan Asmawi Syam sebagai direksi baru menemukan kejanggalan atas laporan keuangan tahun 2017. Setelah dilakukan audit oleh KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) terungkap bahwa telah terjadi *financial statement fraud* pada laporan keuangan tahun 2017 yang mana laba yang sebenarnya bukanlah Rp. 2,4 triliun namun hanya Rp. 428 miliar (CNN Indonesia, 2019).

Maraknya skandal kecurangan laporan keuangan pada perusahaan *go public* yang terjadi akhir-akhir ini dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan bagi pengguna laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi *financial statement fraud*, diantaranya yaitu menurut Nugraheni & Triatmoko (2017), faktor-faktor yang dapat memengaruhi *financial statement fraud* adalah *financial targets*, *external pressure*, dan *financial personal need*. Selain itu Novitasari & Chariri (2018) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi *financial statement fraud* adalah *change in auditor* dan *frequent number of CEO's picture*. Selain itu menurut Janrosli & Yuliadi (2019) profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *financial statement fraud*. Sedangkan Setiawan et al. (2020) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan, pengembangan mutu karyawan, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud*.

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Financial statement fraud tidak hanya dipengaruhi oleh *financial targets*, *external pressure*, *financial personal need*, *change in auditor*, *frequent number of CEO's picture*, profitabilitas, gaya kepemimpinan, pengembangan mutu karyawan, dan budaya organisasi saja tetapi terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya *financial statement fraud* yaitu mekanisme *corporate governance*. Menurut Rezaee dan Relay (2010) dalam buku Indriasih (2020), *financial statement fraud* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dan tidak adanya peran komite audit. Tetapi jika dilihat dari fenomena kasus *financial statement fraud* yang terjadi, hal tersebut tidak sesuai karena pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan *go public* untuk menerapkan mekanisme *corporate governance* demi meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan tahunan Bank Bukopin, diketahui bahwa Bank Bukopin telah menerapkan mekanisme *corporate governance* dengan baik, Bank Bukopin telah memiliki struktur *corporate governance* yang efektif yang terdiri dari RUPS, direksi, dewan komisaris, dan komite penunjang dewan komisaris. Bahkan pada tahun 2016 Bank Bukopin berhasil menerima Indonesia *good corporate governance award* sebagai perusahaan swasta terbuka yang menerapkan mekanisme *corporate governance* terbaik versi Majalah *Ekonomik Review*. Namun faktanya pada tahun 2016 Bank Bukopin melakukan skandal *financial statement fraud*. Berdasarkan fenomena tersebut, pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial statement fraud* menarik untuk diteliti.

Istilah *corporate governance* ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Cadbury Committee. Menurut Sari & Husadha (2020), *corporate governance* merupakan alat kontrol untuk mencegah dan mengurangi perbuatan

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecurangan pada pelaporan keuangan yang melibatkan direksi. Otoritas Jasa Keuangan (2020) menyebutkan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para *stakeholder*, serta meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Mekanisme *corporate governance* sangat perlu diterapkan pada sebuah perusahaan, karena apabila perusahaan dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance*, maka akan menghasilkan sebuah perusahaan yang berkompeten dan dapat mencegah praktik *financial statement fraud*. Dengan diterapkannya mekanisme *corporate governance* maka praktik perusahaan akan lebih transparan sehingga mampu meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan para pemangku kepentingan (Nelwan & Tansuria, 2019). Zhang (2016) menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* pada perusahaan.

Terdapat beberapa mekanisme *corporate governance*, diantaranya yaitu dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, dan rapat komite audit. Dalam FCGI (2001) disebutkan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. Wicaksono & Chariri (2015) mengungkapkan bahwa semakin independen dewan komisaris maka kemungkinan terjadinya *financial statement fraud* akan semakin berkurang. Hal tersebut karena dewan komisaris independen merupakan jabatan yang strategis karena terbebas dari hubungan kekeluargaan maupun hubungan bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, serta karyawan perusahaan sehingga komisaris independen akan menjalankan fungsinya secara efektif sebagai dewan pengawas dalam rangka menerapkan *corporate governance* (Uwuigbe et al., 2019). Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen seharusnya mampu meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.

Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial terutama yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan, maka dewan

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

komisaris harus menyelenggarakan suatu pertemuan atau rapat yang rutin agar tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris lebih baik dan efektif (Shaqila, 2016). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK. 04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam mengefektifkan tugasnya dewan komisaris wajib mengadakan rapat minimal satu kali dalam dua bulan. Marsha & Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa semakin sering rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris maka akan semakin baik tindakan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kebijakan yang diambil oleh direksi.

Menurut FCGI (2001), agar dapat bekerja secara tepat guna sesuai dengan bidangnya, maka dewan komisaris harus mendelegasikan tugasnya kepada beberapa komite. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang berperan dalam proses pelaporan keuangan adalah komite audit. Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa manajemen telah membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, komite audit juga harus memastikan bahwa manajemen telah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku (Qonitin & Yudowati, 2018). POJK No.55/POJK.04/2015 pasal 2 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki komite audit guna mendukung terlaksananya *good corporate governance*. Sebagai komite yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit dianggap dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasannya, khususnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan (Nelwan & Tansuria, 2019). Untuk mengefektifkan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, maka komite audit harus menyelenggarakan rapat secara rutin. Berdasarkan POJK No.55/POJK.04/2015, komite audit harus melakukan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan. Mulyati & Muslih (2020) mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan komite audit salah satunya dapat dinilai dari frekuensi atau jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit. Hal tersebut karena frekuensi rapat komite audit menunjukkan seberapa intensif pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

oleh manajemen. A. Siregar & Surbakti (2019) mengungkapkan bahwa dengan diadakannya rapat komite audit dapat memperkecil peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial statement fraud* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dalam penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan *research gap*. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi memiliki hubungan yang negatif terhadap indikasi *financial statement fraud* (Rengganis et al. (2019); Martins & Júnior (2020); Sari & Husadha, 2020)). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Paminto et al. (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadianto et al., (2020) dan Shalim & Hatane (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dalam satu tahun berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Artinya, semakin tinggi performa rapat dewan komisaris dapat mengurangi *financial statement fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shaqila (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *financial statement fraud*. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *financial statement fraud* (Nurliasari & Achmad, 2020; Rengganis et al. (2019); Marsha & Ghozali, 2017). Sedangkan hasil penelitian Larune et al. (2021) dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*.

Gap penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, dan rapat komite audit terhadap *financial statement fraud*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, dan rapat komite

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

audit terhadap *financial statement fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan metode F-Score sebagai alat ukur *financial statement fraud* dan penelitian dilakukan pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan teori, laporan keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi ekonomi perusahaan sehingga laporan keuangan dapat dijadikan bahan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Namun pada faktanya banyak fenomena kasus *financial statement fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang meyajikan laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Rezaee dan Relay (2010) dalam buku Indriasih (2020), *financial statement fraud* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dan tidak adanya peran komite audit. Tetapi jika dilihat dari fenomena kasus *financial statement fraud* yang terjadi, hal tersebut tidak sesuai karena pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan untuk menerapkan mekanisme *corporate governance* demi meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014, POJK No.55/POJK.04/2015, dan POJK No.55/POJK.03/2016. Namun berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, terlihat bahwa masih saja terdapat perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan sehingga merugikan para pemangku kepentingan.

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan mekanisme *corporate governance*.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial statement fraud* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun masih terdapat kesenjangan hasil penelitian sehingga hasil penelitian tersebut masih diperdebatkan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil bahwa mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hasil penelitian yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, dan rapat komite audit terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*?
2. Apakah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif *financial statement fraud*?
3. Apakah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *financial statement fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh rapat dewan komisaris terhadap *financial statement fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh rapat komite audit terhadap *financial statement fraud*.

Yosi Rosyanah Rahayu, 2022

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme *corporate governance* dan *financial statement fraud*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.